



## STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA PADA PERIODE AWAL COVID-19: POTRET ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

Wiliansyah Pikoli<sup>1</sup>, Anggraito Wisnu Aji<sup>2</sup>, Tri Sulistyarningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Sosiologi, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang  
email: [kokowili07@gmail.com](mailto:kokowili07@gmail.com)<sup>1</sup>, [wisnuaji781@gmail.com](mailto:wisnuaji781@gmail.com)<sup>2</sup>, [sulis226@gmail.com](mailto:sulis226@gmail.com)<sup>3</sup>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright (c) 2024 Sadar Wisata: Jurnal Pawirisata



**Corresponding Author:** Wiliansyah Pikoli, Universitas Muhammadiyah Malang, [kokowili07@gmail.com](mailto:kokowili07@gmail.com)

**Received Date:** 5 Maret 2024

**Revised Date:** 13 Maret 2024

**Accepted Date:** 26 Juni 2024

### Artikel Info

Kata kunci: Covid-19, Kebijakan Pemerintah, Pariwisata Indonesia

### Abstrak

Akibat dari munculnya pandemi Covid-19, akhirnya melemahkan dan membuat terhentinya aktivitas sektor pariwisata di Indonesia. Kondisi ini jika dibiarkan begitu saja, maka akan semakin memperparah perekonomian nasional dan 13 juta tenaga kerja di bidang pariwisata juga akan terkena imbasnya karena hilangnya mata pencaharian mereka. Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan berbagai strategi penanggulangan untuk memulihkan kembali sektor pariwisata Indonesia melalui penerapan berbagai kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memulihkan kembali sektor pariwisata yang melemah dan terhenti akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data didapat melalui berbagai literatur meliputi buku, jurnal ilmiah, serta website pemerintah yang mampu memberikan informasi untuk menguatkan data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pula digunakan teknik analisis data dengan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahap, yakni tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa kebijakan yang diambil untuk memulihkan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terbagi menjadi tiga fase, yaitu Fase Tanggap Darurat, Fase Pemulihan, dan Fase Normalisasi.

### Abstract

*Keywords: Covid-19, Government Policy, Indonesian Tourism*

*As a result of the emergence of the Covid-19 pandemic, it has weakened and halted the activities of the tourism sector in Indonesia. This condition, if left unchecked, will further aggravate the national economy, and 13 million workers in the tourism sector will also be affected due to the loss of their livelihoods. Responding to this, the Government of Indonesia, through the Ministry of Tourism and Creative Economy, presents various countermeasure plans to recover Indonesia's tourism industry by enacting a number of policies. This research aims to see what policies have been taken by the Ministry of Tourism and Creative Economy in restoring the tourism sector that has weakened and stopped due to the Covid-19 pandemic. This research uses a type of library research. Data sources are obtained through various literature, including books, scientific journals, and government websites, that are able to provide information to strengthen the data in this study. This research also uses data analysis techniques with an interactive analysis model that includes three stages, namely the data condensation stage, the data presentation, and the conclusion drawing. This study*

*found that the policies taken to restore the tourism sector by the Ministry of Tourism and Creative Economy are divided into three phases, namely the Emergency Response Phase, the Recovery Phase, and the Normalization Phase.*

---

## PENDAHULUAN

Kemunculan pandemi Covid-19 yang memporak-porandakan dunia, tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan (Wahyuni, 2021). Lebih dari itu, Covid-19 juga menyebabkan terganggunya *supply chain*, dimana tidak terkendalinya aliran produksi barang dan jasa secara global maupun dalam negeri, juga terganggunya volatilitas atau indeks harga yang kemudian mempengaruhi pergerakan harga pasar, terjadinya *demand shocks* atau adanya gangguan tak terduga terhadap permintaan konsumen terkait barang dan jasa, serta timbulnya berbagai dampak negatif pada sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata (Hidayat & Rahmini, 2022). Sektor pariwisata sendiri merupakan sektor yang memegang peran penting dalam pendapatan perekonomian Indonesia, dimana sektor pariwisata termasuk ke dalam tiga besar penyumbang devisa negara (Kristina, 2020). Tercatat bahwa pendapatan devisa dari sektor pariwisata sepanjang tahun 2019 mencapai Rp280 triliun, dimana telah terjadi peningkatan dari pencapaian tahun sebelumnya yang berada di angka Rp270 triliun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah nilai tambah atau Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional dari sektor pariwisata yang mencapai 4,8%, yang kemudian juga berdampak positif dari segi ketenagakerjaan karena berhasil menyerap hingga 13 juta tenaga kerja (Kemenparekraf, 2020).

Indonesia yang juga tidak luput dari hantaman pandemi Covid-19 melakukan berbagai tindakan preventif melalui penerapan kebijakan-kebijakan penanganan untuk

meminimalisir cepatnya penularan infeksi Covid-19. Salah satu dari berbagai kebijakan tersebut adalah PPKM Darurat Jawa-Bali atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Pada Instruksi tersebut, juga tertuang regulasi yang mengatur penutupan sementara pada sektor pariwisata, yaitu pada DIKTUM KETIGA huruf (h) yang menerangkan bahwa adanya penutupan sementara pada fasilitas umum meliputi tempat wisata, taman, dan area publik lainnya. Serta pada huruf (i) menerangkan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan seni, budaya, dan olahraga, serta sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penutupan sementara tersebut, akhirnya membawa sektor pariwisata berada pada titik terendahnya.

Melemahnya sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19, kemudian berakibat pada anjloknya devisa negara sebesar US\$14,5 miliar hingga US\$15,8 miliar yang disebabkan oleh adanya penurunan dari kunjungan wisatawan mancanegara (Hidayat & Rahmini, 2022). Pada awal tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Data tersebut dapat dilihat melalui gambar 1 berikut ini.

**Gambar 1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Moda Angkutan**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020b

BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia pada bulan Desember tahun 2019 menyentuh angka 1,37 juta orang. Namun ketika mewabahnya Covid-19 di Indonesia, membuat angka tersebut merosot sebesar 7,62%, dimana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan pada bulan Januari tahun 2020 yang hanya berada di angka 1,27 juta orang (BPS, 2020b). Turunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan *lockdown* yang dilakukan oleh negara-negara di dunia akibat dari mewabahnya Covid-19 (Pradipta, 2022). Hal ini kemudian membuat ditutupnya akses antarnegara yang pada akhirnya maskapai internasional juga terpaksa menutup rute penerbangannya (Fatmaningdyah & Fatchoelqorib, 2020; Sugiarti, 2021).

Selain tekanan dari penurunan jumlah yang besar dari wisatawan mancanegara akibat dari penurunan pesanan dan pembatalan perjalanan wisata ke Indonesia, tekanan lain juga terjadi pada penurunan jumlah wisatawan domestik, hal ini terjadi akibat perlambatan perjalanan domestik yang disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang enggan beraktivitas maupun melakukan perjalanan di tengah pandemi Covid-19. Bisnis pariwisata dan perjalanan perlahan mulai mengalami kesulitan ketika pandemi Covid-19 telah mewabah, pada akhirnya hal ini juga memberikan dampak yang negatif bagi para pelaku usaha UMKM dan lebih jauh lagi mengakibatkan terganggunya

lapangan kerja (Sugihamretha, 2020). BPS pada tahun 2020 merilis data yang menunjukkan bahwa perkembangan ketenagakerjaan pada sektor pariwisata mengalami kesulitan selama pandemi Covid-19, tercatat ada sejumlah 6 kategori usaha yang berbeda yang mengalami penurunan pada jumlah tenaga kerjanya, yakni pada kategori jasa perusahaan, jasa pendidikan, real estate, penyediaan akomodasi, transportasi, dan administrasi pemerintahan. Dari semua kategori usaha tersebut, jumlah tenaga kerja secara total turun hingga mencapai 409 ribu orang atau tumbuh negatif 0,69% (Kemenparekraf, 2020).

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk melihat bagaimana kemudian arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai strategi dalam upaya memulihkan sektor pariwisata yang sebelumnya melemah dan terhenti akibat pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menjadi penting sebagai bahan percontohan untuk memulihkan sektor pariwisata melalui berbagai kebijakan jika kelak di kemudian hari akan muncul permasalahan yang serupa seperti pandemi Covid-19.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka, dimana penelitian dengan metode ini

berfokus pada aktivitas analisis teks atau wacana yang bertujuan untuk melihat suatu fenomena atau kejadian, baik melalui penelaahan terhadap tindakan maupun karya-karya tertulis yang diteliti agar kemudian didapat informasi dan fakta yang tepat dan terpercaya (Hamzah, 2020).

Zed (2014) mengatakan penelitian kepustakaan dicirikan oleh empat elemen kunci. Yang pertama adalah bahwa alih-alih menggunakan pengetahuan langsung dari lapangan, peneliti cukup bekerja secara langsung dengan teks. Kedua, peneliti hanya perlu berinteraksi langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan karena data pustaka sifatnya sudah siap pakai, sehingga tidak perlu mencari di tempat lain. Ketiga, data pustaka biasanya berasal dari sumber sekunder, yang berarti bahwa peneliti tidak mendapatkan data asli dari sumber langsung di lapangan, melainkan dari tangan kedua. Yang keempat atau terakhir adalah data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena data tersebut merupakan data “mati” yang terekam dalam catatan tertulis seperti teks, angka, foto, rekaman kaset, atau film, maka peneliti bekerja dengan informasi yang tetap, yang tidak akan pernah berubah.

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, meliputi Instruksi Menteri Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, buku laporan industri pariwisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan yang memuat informasi terkait dengan topik yang dibahas.

Teknik analisis data dengan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña kemudian digunakan oleh peneliti untuk

menganalisis data dalam penelitian ini. Teknik analisis data dengan model ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data, dimana aktivitas analisisnya dilakukan secara berkelanjutan dan berulang hingga data yang dianalisis jenuh. Aktivitas analisis data dengan model interaktif ini terdiri dari tiga tahapan, yakni pertama diawali dengan tahap kondensasi data, selanjutnya melewati tahap penyajian data, dan kemudian diakhiri dengan tahap penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pariwisata Indonesia Saat Pandemi Covid-19

Penutupan tempat-tempat rekreasi, hiburan, dan berbagai destinasi di Indonesia karena mewabahnya Covid-19, serta adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar berakibat pada sulitnya mobilitas masyarakat yang kemudian hal tersebut membuat seluruh aktivitas di sektor pariwisata terhenti (Rachmawati & Alhazami, 2022).

BPS pada tahun 2020 merilis data yang menunjukkan terdapat 4,20 juta kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia selama tahun 2020. Angka tersebut sangatlah kecil, dimana penurunan yang sangat tajam telah terjadi hingga sebesar 75,03% jika dibandingkan dengan total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 yang menyentuh angka 16,11% kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 tersebut, terdiri atas wisatawan mancanegara yang melakukan kunjungan melalui beberapa pintu masuk, seperti melalui jalur udara sebanyak 1,67 juta kunjungan, kemudian pada jalur laut sebanyak 1,02 juta kunjungan, dan terakhir pada jalur darat sebanyak 1,33 juta kunjungan (BPS, 2020a).

**Tabel 1: Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Pintu Masuk Jalur Udara**

Pintu Masuk	Jumlah Kunjungan					Perubahan Des 2020 thd 2019 (%)	Perubahan Des 2020 thd Nov 2020 (%)	Perubahan Jan–Des 2020 thd 2019 (%)
	Des 2019	Nov 2020	Des 2020 <sup>1)</sup>	Jan–Des 2019	Jan–Des 2020 <sup>1)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Pintu Udara	838 978	16 080	23 599	9 834 706	1 674 394	-97,19	46,76	-82,97
1. Ngurah Rai	544 726	2	127	6 239 543	1 041 420	-99,98	6 250,00	-83,31
2. Soekarno-Hatta	186 723	14 309	21 812	2 419 196	420 506	-88,32	52,44	-82,62
3. Juanda	20 546	69	85	243 899	34 977	-99,59	23,19	-85,66
4. Kualanamu	22 431	44	54	244 530	41 455	-99,76	22,73	-83,05
5. Husein Sastranegara	14 951	1	–	157 833	30 309	-100,00	-100,00	-80,80
6. Adi Sucipto/YIA	9 795	–	–	113 028	18 640	-100,00	–	-83,51
7. Bandara Int. Lombok	5 499	1	2	57 763	11 863	-99,96	100,00	-79,46
8. Sam Ratulangi	10 743	1 577	1 469	130 285	23 026	-86,33	-6,85	-82,33
9. Minangkabau	5 180	–	–	61 131	10 875	-100,00	–	-82,21
10. Sultan Syarif Kasim II	4 042	3	–	34 419	6 796	-100,00	-100,00	-80,26
11. Sultan Iskandar Muda	4 012	–	–	28 303	10 344	-100,00	–	-63,45
12. Ahmad Yani	2 627	–	–	23 977	4 936	-100,00	–	-79,41
13. Supadio	1 527	–	–	22 500	4 390	-100,00	–	-80,49
14. Hasanuddin	1 821	1	–	17 771	3 573	-100,00	-100,00	-79,89
15. Sultan Badaruddin II	762	2	–	15 846	2 335	-100,00	-100,00	-85,26
16. Lainnya	3 593	71	50	24 682	8 949	-98,61	-29,58	-63,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020a

Jika diperhatikan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui jalur udara pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, BPS mencatat pada sepanjang tahun 2019 angka kunjungan wisatawan mancanegara berada di angka 9,834,706 kunjungan, Namun pada tahun berikutnya, yaitu sepanjang tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya berada di angka 1,674,394 kunjungan, artinya bahwa telah terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat besar antara tahun 2019 dengan tahun 2020, yaitu sebesar 82,97%. Kunjungan wisatawan mancanegara yang mengalami penurunan ini terjadi serentak di seluruh pintu

masuk jalur udara. Bahkan di beberapa bandara, penurunan tembus di angka 100% seperti yang terjadi di Bandara Husein Sastranegara, Bandara Adi Sucipto/YIA, Bandara Minangkabau, Bandara Jenderal Ahmad Yani, Bandara Supadio, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Bandara Sultan Badaruddin II. Namun Bandara Sam Ratulangi mencatatkan persentase terendah yaitu 86,33%, diikuti oleh Bandara Soekarno-Hatta dengan persentase penurunan sebesar 88,32% (BPS, 2020a). Akibat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini, kemudian memberi dampak yang sangat besar pada penurunan tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di Indonesia, seperti yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2: Tingkat Penghunian Kamar Hotel Klasifikasi Bintang di Indonesia**

Provinsi	TPK (%)			Perubahan Des 2020 thd Des 2019 (poin)	Perubahan Des 2020 thd Nov 2020 (poin)
	Des 2019	Nov 2020	Des 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Aceh	41,70	37,71	31,76	-9,94	-5,95
2. Sumatera Utara	51,09	34,41	41,02	-10,07	6,61
3. Sumatera Barat	60,18	47,49	53,44	-6,74	5,95
4. R i a u	51,93	42,92	36,39	-15,54	-6,53
5. Jambi	49,51	40,93	40,74	-8,77	-0,19
6. Sumatera Selatan	58,98	48,92	53,83	-5,15	4,91
7. Bengkulu	67,97	45,45	45,00	-22,97	-0,45
8. Lampung	69,51	59,14	59,32	-10,19	0,18
9. Kepulauan Bangka Belitung	39,08	28,42	28,79	-10,29	0,37
10. Kepulauan Riau	56,67	24,64	27,41	-29,26	2,77
11. DKI Jakarta	61,59	45,63	45,40	-16,19	-0,23
12. Jawa Barat	62,40	48,89	45,22	-17,18	-3,67
13. Jawa Tengah	53,29	37,89	35,69	-17,60	-2,20
14. DI Yogyakarta	72,43	44,99	45,31	-27,12	0,32
15. Jawa Timur	62,77	45,47	47,77	-15,00	2,30
16. Banten	51,96	42,61	38,51	-13,45	-4,10
17. Bali	62,55	9,32	19,00	-43,55	9,68
18. Nusa Tenggara Barat	47,79	37,30	43,90	-3,89	6,60
19. Nusa Tenggara Timur	53,75	42,51	38,00	-15,75	-4,51
20. Kalimantan Barat	51,14	42,03	38,39	-12,75	-3,64
21. Kalimantan Tengah	55,85	58,21	48,27	-7,58	-9,94
22. Kalimantan Selatan	52,47	52,74	51,21	-1,26	-1,53
23. Kalimantan Timur	63,90	54,76	59,78	-4,12	5,02
24. Kalimantan Utara	48,61	45,13	39,34	-9,27	-5,79
25. Sulawesi Utara	59,49	51,48	42,39	-17,10	-9,09
26. Sulawesi Tengah	56,65	50,84	49,69	-6,96	-1,15
27. Sulawesi Selatan	56,11	42,56	54,82	-1,29	12,26
28. Sulawesi Tenggara	53,65	40,29	43,63	-10,02	3,34
29. Gorontalo	42,29	58,80	56,90	14,61	-1,90
30. Sulawesi Barat	49,21	43,08	49,54	0,33	6,46
31. Maluku	44,09	45,18	43,29	-0,80	-1,89
32. Maluku Utara	63,22	39,47	43,19	-20,03	3,72
33. Papua Barat	56,68	53,51	58,51	1,83	5,00
34. Papua	48,33	55,22	36,25	-12,08	-18,97
<b>INDONESIA</b>	<b>59,39</b>	<b>40,14</b>	<b>40,79</b>	<b>-18,60</b>	<b>0,65</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020a

BPS tahun 2020 merilis data yang menunjukkan pada bulan Desember tahun 2020 telah terjadi penurunan persentase Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia, dimana pada bulan Desember tahun 2020 persentase penurunannya berada di angka rata-rata 40,79% sedangkan pada bulan Desember tahun 2019 berada di angka rata-rata 59,39%. Terdapat beberapa provinsi yang memiliki persentase TPK tertinggi dan terendah, dimana provinsi dengan persentase TPK tertinggi didapatkan oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan angka

sebesar 59,79%, posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Provinsi Lampung dan Provinsi Papua Barat yang masing-masing mendapat angka sebesar sebesar 59,32% dan 58,51%. Untuk TPK dengan persentase paling rendah dialami oleh Provinsi Bali dengan hanya 19,00% saja (BPS, 2020a).

Dengan persentase pada bulan Desember 2019 sebesar 59,39% dan pada bulan Desember 2020 sebesar 40,79%, menunjukkan telah terjadi penurunan sebesar 18,60 poin. Data pada tabel 2 tersebut juga menunjukkan terdapat beberapa provinsi yang justru

mengalami peningkatan, artinya bahwa tidak semua provinsi mengalami penurunan persentase TPK. Terdapat 3 provinsi yang mengalami peningkatan, yakni Provinsi Gorontalo dengan peningkatan 14,61 poin, kemudian Provinsi Papua Barat dengan peningkatan 1,83 poin, dan terakhir adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan peningkatan 0,33 poin. Sedangkan provinsi dengan penurunan persentase TPK tertinggi dialami oleh 4 provinsi, dimana Provinsi Bali berada di urutan pertama dengan penurunan persentase TPK sebesar 43,55 poin, lalu disusul oleh Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bengkulu yang berada di urutan kedua, ketiga, dan keempat dengan masing-masing angka penurunan persentase TPK sebesar 29,26 poin, 27,12 poin, dan 22,97 poin. Di sisi lain, Provinsi Maluku menjadi provinsi dengan penurunan TPK terendah hanya dengan 0,80 poin saja (BPS, 2020a).

## **2. Strategi Pemulihan Pariwisata oleh Pemerintah Indonesia Pada Periode Awal Covid-19: Kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia**

Terpuruknya sektor pariwisata Indonesia akibat pandemi Covid-19 kemudian mulai mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin mencari solusi dalam menanganinya. Sebagai upaya dalam meminimalisir dampak yang akan semakin parah dirasakan oleh industri-industri dan para pelaku di sektor pariwisata, pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya melalui pengambilan kebijakan sebagai sebuah bentuk strategi untuk memulihkan kembali sektor pariwisata setelah dilanda pandemi Covid-19.

Di skala nasional, pemerintah pusat lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Kemenparekraf menerapkan sebuah kebijakan sebagai upaya dalam menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 yang melemahkan sektor pariwisata Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam buku yang berjudul *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2020/2021* yang merupakan rangkuman gambaran kondisi industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sepanjang tahun 2020 dan rencana pembangunan sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2021. Kebijakan pemulihan pariwisata Indonesia yang digagas oleh Kemenparekraf tersebut dibagi ke dalam 3 fase, yang pertama

adalah Fase Tanggap Darurat, kedua adalah Fase Pemulihan, dan yang ketiga adalah Fase Normalisasi (Kemenparekraf, 2020).

### **a. Fase Tanggap Darurat**

Fase ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Kemenparekraf dalam merespon pandemi Covid-19. Kemenparekraf pada fase ini sepenuhnya memfokuskan penanggulangan bencana Covid-19 pada bidang kesehatan, dimana terdapat macam-macam program perlindungan sosial seperti insentif usaha melalui kebijakan fiskal dan moneter, kemudian menggerakkan produktivitas serta kreativitas ketika *Work From Home*, hal ini sejalan seperti yang disampaikan oleh OECD atau *Organization of Economic Co-operation and Development* bahwa perlindungan sosial memiliki kemampuan untuk menurunkan risiko, dapat mempertahankan tingkat konsumsi, serta dapat menjaga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dari bencana yang tidak diinginkan (OECD, 2019). Selain program perlindungan sosial, juga dilakukan koordinasi terkait krisis kepariwisataan dengan berbagai daerah yang terdampak, dan terakhir melakukan persiapan pemulihan (Mutma, 2022).

Pada fase tanggap darurat ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu, pemberian bantuan fasilitas akomodasi berupa 1,408 kamar di 11 hotel untuk 2,375 tenaga kesehatan, juga disediakan 5 jenis transportasi berbeda agar pelayanan kesehatan selama masa krisis dapat dilakukan secara maksimal. Memperhatikan kondisi tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, terlebih pada masa pandemi Covid-19, seperti yang juga diungkapkan oleh Chumaida et al (2021) bahwa tenaga kesehatan perlu diperhatikan sebab dalam penanganan pasien Covid-19, mereka yang menjadi garda terdepan yang bergerak dalam membantu penyembuhan, kemudian pelayanan kesehatan juga tidak kalah penting karena menjadi tulang punggung pada kondisi krisis selama pandemi Covid-19 sehingga harus terus ditingkatkan.

Selanjutnya para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 kemudian diberikan bantuan berupa bahan pokok dan lauk siap saji, dan terakhir Kemenparekraf menggelar Gerakan Masker Kain dengan menggandeng para desainer lokal dari sektor fashion yang terdampak Covid-19 untuk

memproduksi sebanyak 100.000 masker kain yang akan dibagikan kepada para pekerja sektor pariwisata, sektor kreatif, pekerja publik dan para pekerja di sektor lainnya. Tindakan yang diambil oleh Kemenparekraf tersebut telah sejalan dengan apa yang ditekankan oleh ILO atau *International Labour Organization* yang mengarahkan pemerintah untuk memberikan dukungan yang efektif dan tepat waktu untuk menjaga daya beli pendapatan tenaga kerja, serta pemerintah juga harus memastikan bahwa kelompok dan sektor yang terkena dampak Covid-19, terutama UMKM dan para pekerja yang beroperasi di sektor ekonomi informal harus dilindungi melalui program perlindungan sosial (ILO, 2022).

Tidak berhenti disitu, Kemenparekraf juga turut andil dalam mendukung Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 yaitu berupa pembebasan PPh 21, 22, dan 25 yang kemudian hal tersebut juga diperuntukkan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan terkait Insentif Pajak untuk Wajib Pajak ini diungkapkan oleh Ambarwati et al (2021) berguna sebagai tambahan penghasilan untuk Wajib Pajak Pribadi (WPOP) sebab dalam kebijakan tersebut, pajak dari penghasilan mereka akan ditanggung. Kemudian pembebasan PPh tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berinovasi pada usaha mereka agar dapat bertahan pada masa pandemi Covid-19.

#### **b. Fase Pemulihan**

Pada fase kedua ini, upaya yang dilakukan oleh Kemenparekraf berupa pemulihan wisata domestik secara bertahap dengan mulai dibukanya tempat wisata yang tersertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*). Sertifikasi CHSE sendiri merupakan suatu proses diberikannya sertifikat bagi para pelaku industri pariwisata yang meliputi destinasi dan produk pariwisata yang ditawarkan, dimana kemudian fungsi dari sertifikat CHSE tersebut untuk meyakinkan para wisatawan dan masyarakat bahwa barang dan jasa yang ditawarkan sudah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan (Candranegara et al., 2021). Selain itu, Kemenparekraf juga mendukung optimalisasi kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) dalam negeri oleh kementerian atau lembaga dan BUMN.

Kegiatan MICE digambarkan oleh Kusuma (2019) sebagai sebuah industri multiasset, hal ini didasari pada kegiatan MICE itu sendiri yang mencakup spektrum industri yang luas, termasuk perdagangan, perbankan, teknologi informasi, perhotelan, perjalanan, hiburan, tempat penyelenggaraan acara, makanan dan minuman, dan transportasi. Kemudian terakhir pada fase pemulihan ini pula dilakukan strategi ulang terhadap pembangunan pariwisata.

Untuk mulai melaksanakan fase pemulihan ini, Kemenparekraf sebelumnya sudah mempersiapkannya dengan matang melalui penyusunan protokol CHSE, simulasi penerapan protokol CHSE juga akan dilakukan, kegiatan sosialisasi dan publikasi terkait protokol CHSE pun sedang berjalan, dan terakhir adalah pelaksanaan uji coba destinasi yang sepenuhnya menerapkan protokol CHSE. Penerapan protokol CHSE ini diungkapkan oleh Amelia & Prasetyo (2022) menjadi strategi yang bagus yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada para pelaku industri pariwisata karena dalam prosesnya dapat membantu melakukan perbaikan layanan di semua lini pada kawasan pariwisata.

#### **c. Fase Normalisasi**

Pada fase terakhir yaitu fase normalisasi, Kemenparekraf melakukan persiapan destinasi dengan penerapan protokol CHSE secara penuh di berbagai daerah di Indonesia, salah satu contohnya pada industri pariwisata di Pulau Bali. Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia yang juga menjadi salah satu pintu gerbang utama pariwisata di Indonesia, memberi kontribusi yang besar dari segi jumlah kunjungan wisatawan. Namun setelah pandemi Covid-19 mewabah, akhirnya mengakibatkan terjadinya penurunan kunjungan wisatawan secara besar-besaran ke pulau yang berjuluk Pulau Dewata tersebut (Mardika, 2022). Untuk menghindari kondisi demikian agar tidak terus berkepanjangan, maka yang harus dilakukan adalah dengan membangun kembali *trust* atau kepercayaan, yang mana *trust* ini merupakan suatu hal yang sangat esensial di dunia pariwisata sehingga wajib untuk dilakukan (Yanti et al., 2022). Terdapat satu cara paling efektif dalam meningkatkan *trust* para wisatawan, yakni menjamin aktivitas berwisata mereka melalui penerapan protokol CHSE, hal ini diungkapkan oleh Listyorini & Hakim (2023) melalui hasil riset mereka yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif

dan signifikan penerapan protokol CHSE terhadap kepercayaan wisatawan.

Pemberian insentif, diskon paket wisata dan kegiatan MICE juga terus dilanjutkan oleh Kemenparekraf untuk meningkatkan kembali minat pasar, dimana *Virtual Travel Fair* merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan sebagai pemantik untuk menarik perhatian para wisatawan, yang mana Djunarto et al (2022) mengungkapkan hal yang serupa, bahwa *Virtual Tour* menjadi salah satu alternatif sekaligus menjadi sebuah strategi yang efektif bagi para pelaku industri pariwisata karena memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Kemenparekraf yang menginisiasi penyelenggaraan *Virtual Travel Fair*, yang mana telah dilaksanakan selama lima pekan berturut-turut sejak bulan Agustus hingga November 2020, kemudian berhasil menarik

perhatian para pelaku sektor pariwisata. Dengan memanfaatkan jalur digital sebagai sarana kreasi dan ekspresi, maka muncullah apa yang dikenal sebagai *virtual travelling*, yaitu dimana para wisatawan diajak untuk melakukan perjalanan sekaligus mengeksplor tempat wisata populer di beberapa lokasi hanya dengan menggunakan ponsel mereka. Terkait *virtual travelling* ini, Kemenparekraf mencatat terdapat lebih dari 64 lokasi yang dapat dikunjungi di Indonesia melalui cara virtual lewat beragam jenis aplikasi yang dapat diunduh di *Google Playstore* dan *App Store*.

Melalui fenomena *virtual travelling* ini pula, beberapa pemerintah daerah mengambil kesempatan dengan menggelar *event* wisata virtual, dimana diantaranya sudah berjalan yaitu Manado Fiesta Virtual 2020 dan Dieng Culture Festival 2021.

Gambar 2: Manado Fiesta Virtual 2020



Sumber: Beritasulut.co.id, 2020

Gambar 3: Dieng Culture Festival 2021



Sumber: Opinijateng.com, 2021

## KESIMPULAN

Kemunculan pandemi Covid-19 yang pada akhirnya melemahkan hingga menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas pada sektor pariwisata, membuat pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia merespon masalah tersebut dengan cepat melalui pengambilan berbagai kebijakan sebagai strategi dalam upaya untuk memulihkan sektor pariwisata Indonesia yang dihantam oleh pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan yang diambil oleh Kemenparekraf tersebut terbagi ke

dalam 3 fase, yakni Fase Tanggap Darurat, Fase Pemulihan, dan Fase Normalisasi. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan nantinya sektor pariwisata akan pulih dan dapat berjalan kembali, yang mana hal itu akan meningkatkan pula perekonomian Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, R., Susanto, & Tumanggor, S. (2021). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *HUMANIS (Humanities, Management and Science*

- Proceedings*, 1(2), 815–826.  
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH/article/view/11875>
- Amelia, V., & Prasetyo, D. (2022). Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, & Environment) terhadap Objek Wisata sebagai Wujud Pemenuhan Hak Wisatawan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 5(2), 92–99.  
<https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i2.49461>
- BPS. (2020a). *Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Desember 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS. (2020b). *Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Januari 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Candranegara, I. M. W., Mirta, I. W., & Putra, K. A. F. (2021). Implementasi Program “We Love Bali” Berbasis CHSE (Clean, Health, Safety, Environment) dalam Pemulihan Pariwisata Bali. *Journal of Contemporary Public Administration*, 1(1), 27–32.  
<https://doi.org/10.22225/jcpa.1.1.2021.27-32>
- Chumaida, Z. V., Subagyono, B. S. A., & Roro, F. S. R. (2021). Kebijakan Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 5(2), 158–183.  
<https://doi.org/10.25139/lex.v5i2.4577>
- Djunarto, Subiyantoro, H., & Sutrisno. (2022). Virtual Tour Pada Sektor Pariwisata Indonesia di Era New Normal. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 4(1), 25–32.  
<https://doi.org/10.51977/jiip.v4i1.739>
- Fatmaningdyah, Y., & Fatchoelqorib, M. (2020). Kebijakan Perjalanan Udara di Masa Pandemi Corona Virus (Covid-19). *AVIASI: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 17(1), 21–34.  
<https://doi.org/10.52186/aviasi.v17i1.56>
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayat, R., & Rahmini, N. (2022). Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) di Kalimantan Selatan. *Ecoplan*, 5(2), 129–141.  
<https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.538>
- ILO. (2022). *Pemantauan ILO Edisi Ke-9: Dampak COVID-19 dan Dunia Kerja - Estimasi dan Analisis Terbaru*. Diakses pada 13 September 2023, dari [https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS\\_849543/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_849543/lang--en/index.htm)
- Kememparekraf. (2020). *Outlook Pariwisata & Ekonomi Kreatif Indonesia 2020/2021*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kristina, N. M. R. (2020). Pemulihan Ekonomi Pariwisata Bali di Era New Normal. *Cultoure*, 1(2), 136–142.  
<https://doi.org/10.55115/cultoure.v1i2.828>
- Kusuma, C. S. D. (2019). MICE - Masa Depan Bisnis Pariwisata Indonesia. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 16(2), 52–62.  
<https://doi.org/doi.org/10.21831/efisiensi.v16i2.27420>
- Listyorini, H., & Hakim, P. A. R. (2023). Pengaruh Penerapan CHSE Daya Tarik Wisata Terhadap Kepercayaan Wisatawan yang Berdampak pada Minat Berkunjung. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(2), 215–233.  
<https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.1438>
- Mardika, I. N. (2022). Peran Serta Desa Adat Bali dalam Pembangunan dan Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Covid-19. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 211–217.  
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1728>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Mutma, F. S. (2022). Manajemen Krisis Pariwisata Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kememparekraf RI Periode 2021-2022). *E-Proceeding CORE Universitas Pembangunan Jaya*, 2022(2), 1–5.  
<https://www.core.upj.ac.id/detailAbstrak/88>
- OECD. (2019). *Can Social Protection Be an Engine for Inclusive Growth?* OECD Publishing.  
<https://doi.org/10.1787/9d95b5d0-en>
- Pradipta, M. P. Y. (2022). Strategi Pemulihan Potensi Pariwisata di Kota Surakarta. *BARISTA: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 9(2), 99–109.

- <https://doi.org/10.34013/barista.v9i01.873>
- Rachmawati, A., & Alhazami, L. (2022). Strategi Pemulihan Ekonomi Pada Bidang Pariwisata di Era New Normal DKI Jakarta. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v4i1.53>
- Sugiarti. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerbangan di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(1), 113–122. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/638>
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesia Journal of Development Planning*, 4(2), 191–206. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113>
- Wahyuni, D. (2021). Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2), 121–137. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2502>
- Yanti, N. W. N., Ardani, W., & Putri, I. A. S. (2022). Peningkatan Trust and Visit Intentions Wisatawan ke Destinasi Wisata di Bali melalui Presidensi G20 Indonesia (Studi Kasus di Monkey Forest, Ubud). *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1(1), 46–51. <https://doi.org/10.54371/jms.v1i1.162>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.